

# **PESANTREN DAN DEMOKRATISASI**

## **(STUDI PERGULATAN PESANTREN NURUL UMMAH DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEBEBASAN DALAM PENDIDIKAN)**

*Sabarudin*

Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
sabarudin@yahoo.com

### **Abstract**

*This article observes the relation between pesantren and democracy. Generally speaking, pesantren is viewed as traditional Islamic boarding school that is exclusive and un-democratic. This impression comes to existence due to the tendency of monopoly of leadership by Kiai, a founding father and owner of pesantren. However, in line with social transformation and the expansion of science and technology, and the interaction of pesantren with higher education, such impression is no longer exist. Negative impression that pesantren is undemocratic Islamic educational institution or democracy is not easy to be compromised to pesantren is not always true. This articles aims to show that pesantren has changed; it gives room for freedom of expression and participation, either through process of learning in class or social life out of class.*

**Kata kunci:** democracy, pesantren, leadership, kyai

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi dunia pesantren. Telah lama dunia pesantren menggeluti nilai-nilai demokrasi, terutama ketika muncul program pengembangan masyarakat di pesantren sekitar tahun 1970-an. Tema yang diangkat kala itu memang tidak memakai kata demokrasi, tetapi isu yang dikembangkan mempunyai kemiripan. Misal isu pengembangan masyarakat yang diangkat oleh LP3ES pada awal 1970-an, yang intinya ingin membangkitkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan meningkatkan ekonomi. Jika dikaitkan isu demokrasi sekarang, barangkali program itu mirip atau sama dengan program partisipasi aktif untuk menyuarkan kehendak.<sup>1</sup>

Pendidikan di pesantren, sebagai sub sistem pendidikan nasional memang diharapkan dapat ikut serta dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Sebab dengan keikutsertaan tersebut berarti

---

<sup>1</sup> Jamhari Makruf, "Pengalaman Pondok Pabelan: Demokrasi Kecil di Tengah-tengah Lingkungan Pesantren", makalah seminar Pendidikan Demokrasi di Pesantren 20-22 April 2005 di Cipayung Bogor, hlm. 1.

pesantren telah ikut andil dalam menyiapkan peserta didik untuk terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggungjawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya, dan mempelajari kehidupan masyarakat.

Akhir-akhir ini pesantren bahkan sudah menjadi bagian arus utama perubahan politik di tanah air. Kiai menjadi daya tarik politik yang sangat kuat karena dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam penelitian Endang Turmudi, yang mengungkap signifikansi antara dukungan kiai di Jombang dengan perolehan suara yang diperoleh sebuah partai politik.<sup>2</sup>

Selain itu saat ini juga banyak lulusan pesantren yang terlibat secara aktif dalam perubahan politik secara nyata. Naiknya tokoh pesantren seperti Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) menjadi presiden adalah bukti yang nyata dari pergeseran peran politik kiai di tingkat politik yang lebih besar. Bahkan Gus Dur, terlepas dari berbagai kekurangan yang melekat padanya, ketika menjabat menjadi presiden banyak memperjuangkan demokratisasi.

Di sisi lain, saat ini juga banyak NGO dan LSM serta kelompok studi yang anggotanya lulusan pesantren, sangat aktif menyuarakan demokrasi dan menjadi pendukung utama konsolidasi demokrasi di Indonesia.<sup>3</sup> Diskusi para pakar alumni pesantren yang terpublikasi dalam buku "Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi" juga membuktikan bahwa mereka ternyata tidak asing dengan nilai-nilai demokrasi, seperti pluralisme, kesetaraan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perjumpaan dengan berbagai masalah-masalah keduniawian seperti persoalan kekuasaan dan pergaulan sosial sangat memungkinkan masuknya nilai-nilai demokrasi sebagai alternatif lain untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Salah satu contoh

---

<sup>2</sup> Pasca kebijakan "kembali ke khittah" pada tahun 1984, beberapa kiai di Jombang secara eksplisit menganjurkan para pengikutnya untuk memilih Golkar pada pemilu 1987. Akibatnya, perolehan suara nasional PPP dari 25,8% pada pemilu 1982 menjadi 15,3% pada pemilu 1987. Di Jombang perolehan suara PPP pada pemilu 1987 turun 36% dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 1982. Lihat, Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, terj. Suprianto Abdi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm 184 -185.

<sup>3</sup> Jamhari Makruf, "Pengalaman Pondok Pabelan.....", hlm. 1

<sup>4</sup> Baca, Ahmad Suaedy (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

yang terkait dengan persoalan kepemimpinan di pesantren adalah suksesi atau pergantian lurah pondok, yang biasanya terjadi di pesantren salaf.

Keberadaan lurah pondok yang biasanya diamanahkan kepada ustadz senior untuk menjadi wakil kiai, adalah juga membuktikan bahwa ada praktek demokrasi di pesantren, karena "lurah pondok" biasanya dipilih oleh para santri. Walau tidak bisa dinafikan bahwa meski telah dibentuk pengurus yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya pesantren sehari-hari, kekuasaan mutlak senantiasa masih berada di tangan sang kiai.<sup>5</sup>

Tetapi juga harus diakui, bahwa tantangan yang dihadapi pesantren semakin hari semakin besar, kompleks, dan mendesak sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan ini menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai di pesantren, baik nilai yang menyangkut sumber belajar maupun nilai yang menyangkut pengetahuan pendidikan. Hal tersebut, menurut Mastuhu<sup>6</sup>, akan memaksa pesantren untuk mencari bentuk baru. Misal, kiai bukan lagi merupakan satu-satunya sumber belajar, meski kedudukan kiai di pesantren masih tetap merupakan tokoh kunci. Menyadari semakin banyaknya buku terjemahan yang beredar, kiai akhirnya merestui santri belajar apa saja asal tetap pada aqidah-syariah agama dan berpegang pada moral agama. Pesantren juga mempersilahkan santri belajar di lembaga formal di luar pesantren. Bahkan pesantren juga sudah banyak yang menyelenggarakan pendidikan formal, di samping masih menyelenggarakan sistem diniyah.<sup>7</sup>

Perubahan ini menunjukkan inklusivitas pondok pesantren dalam menyikapi arus perubahan dari luar. Munculnya kelompok

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Sub Kultur", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan.....*, hlm. 46

<sup>6</sup> Lihat, Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 66-67

<sup>7</sup> Menurut Azra, inovasi yang terjadi di pesantren teramati dari: *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subyek-subyek umum dan *vocational*; *kedua*, pembaruan metodologi, seperti perubahan sistem pengajaran kitab-kitab tradisional yang semula menggunakan model *bandongan* dan *sorogan*, kemudian beralih kepada sistem klasikal dan penjenjangan; *ketiga*, pembaruan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*, pembaruan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial ekonomi. Lihat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 105

generasi muda *jebolan* pesantren yang terlibat dalam diskusi ide-ide tentang perubahan kemungkinan besar juga karena mendapat bekal pola pikir inklusif di pesantren. Misal, Ulil Abshar Abdalla dengan Jaringan Islam Liberalnya, yang mampu mengguncang wacana pemikiran umat Islam Indonesia.

Inklusivitas pesantren, juga ditunjukkan dengan akomodatifnya pesantren terhadap produk-produk teknologi sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi. Dengan masuknya produk teknologi modern yang tak lain adalah media global, sudah barang tentu membuka lebar bagi masuknya nilai-nilai global, seperti nilai-nilai demokrasi, ke dalam pesantren. Sebab melalui media global, semacam televisi, persoalan demokrasi baik di dalam maupun di luar negeri merupakan pemberitaan yang mendapatkan porsi cukup besar. Maka dengan semakin intensnya pesantren mengakses produk teknologi global, akan menjadikan santri semakin luas wawasan berpikirnya, termasuk dalam kaitannya dengan persoalan demokrasi.<sup>8</sup>

Secara konvensional, pesantren memang tidak secara khusus melakukan pendidikan demokrasi<sup>9</sup>, tetapi bukan berarti tradisi di pesantren jauh dari tradisi yang demokratis. Tradisi keilmuan para santri adalah tradisi yang demokratis, seperti adanya penghargaan atas perbedaan, menganggap wajar pluralitas, sikap *tasamuh* atau toleransi, *tawassuth* atau jalan tengah, *tawazun* atau keseimbangan, dan *i'tidal* atau bersikap adil.<sup>10</sup> Dengan demikian, pesantren dalam tataran tertentu tampaknya sudah secara sadar atau tidak melakukan sosialisasi, penanaman dan aktualisasi nilai-nilai demokrasi.

Hal demikian, juga terjadi di pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Berdasar hasil penelitian pendahuluan, pesantren Nurul Ummah telah memiliki media publikasi seperti: majalah, majalah dinding, dan bulletin. Media publikasi tersebut sering digunakan sebagai media pemberitaan hal-ikhwal seputar pesantren, baik menyangkut kebijakan pesantren, keluhan-kesah santri dan kegiatan sosial kemasyarakatan pesantren serta hasil cipta rasa

---

<sup>8</sup> Lihat, Muhtarom HM., "Pondok pesantren Tradisional di Era Globalisasi: Kasus Reproduksi Ulama di Kabupaten Pati Jawa Tengah", *Disertasi*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 315-316. Dalam disertasi tersebut Muhtarom membuktikan, bahwa dengan mengakses media global, maka para santri menjadi semakin luas wawasan berpikirnya.

<sup>9</sup> Lihat, Endang Turmudi, "Demokrasi dalam Pendidikan di Pesantren", *Makalah*, Seminar Pendidikan Demokrasi di Pesantren 20-22 April 2005 di Cipayung Bogor, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8

dan karsa para santri.<sup>11</sup> Hasil pembacaan terhadap buku *Panduan Pondok Pesantren Nurul Ummah* juga memberikan masukan bahwa model diskusi (musyawarah) ternyata bukan merupakan sesuatu yang asing dalam pembelajaran kitab.<sup>12</sup>

Deskripsi di atas setidaknya memberikan sedikit informasi bahwa dalam pendidikan di pesantren, ada ruang-ruang bagi tumbuh kembangnya nilai kebebasan. Meski tidak dinafikan, bahwa sosok kiai pengasuh pesantren yang sering dipandang sebagai pemimpin kharismatik, meragukan Martin Van Bruinessen akan adanya demokrasi di pesantren. Sebab menurutnya kharisma cenderung memperkokoh bangunan otoritas tunggal yang bertentangan secara frontal dengan alam keterbukaan,<sup>13</sup> sehingga pada pesantren yang masih menggunakan pola kepemimpinan kharismatik ada kecenderungan pada bekunya nilai-nilai demokrasi, termasuk nilai kebebasan.

Namun demikian, seiring dengan arus demokratisasi yang menerpa bangsa Indonesia pada masa-masa akhir kekuasaan pemerintahan Orde Baru dan dalam era reformasi serta perkembangan politik pada level internasional, maka dunia pesantren pun tentu tidak bisa melepaskan diri dari arus tersebut. Di sisi lain, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tata nilai yang khas, pesantren sesungguhnya juga merupakan sebuah laboratorium sosial kemasyarakatan yang diharapkan mampu menanamkan keyakinan, kepribadian, watak kemandirian dan kesederhanaan, dan akhirnya dapat melahirkan warga masyarakat yang siap berkiprah, tahan uji, dan siap menegakkan kebenaran.

Dengan demikian jelas bahwa pesantren bukan semata melaksanakan tugas pendidikan dalam arti pencerdasan, tetapi juga merupakan media bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi. Sisi inilah yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Sebagai sebuah miniatur masyarakat "ideal", bagaimana cara pesantren mendidik para santrinya. Dalam arus demokratisasi yang semakin kuat, sejauhmana pesantren menyerap dan mempraktekkan nilai-nilai kebebasan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas kehidupan sivitas pesantren.

---

<sup>11</sup> Subegjo Puji Waluyo, dkk., *Panduan Pondok Pesantren Nurul Ummah*, (Yogyakarta: Nurma Media, 2003), hlm. 47-49

<sup>12</sup> Tim Revisi, *Panduan Pondok Pesantren Nurul Ummah* (Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2005), hlm. 51

<sup>13</sup> Martin Van Bruinessen, "Konjungtur Sosial Politik di Jagat NU Paska Khithah 26: Pergulatan NU Dekade 90-an" dalam KH. Darwis Ellyasa, *Gus Dur dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1990), hlm. 78.

Sisi lain yang menjadikan ketertarikan penulis adalah: pertama, meski secara umum banyak pandangan bahwa demokrasi dan pesantren adalah dua hal yang sulit bisa dikompromikan, disebabkan kehidupan pesantren adalah kehidupan yang unik, tetapi dengan semakin berkembangnya bentuk pesantren seperti dengan memiliki badan hukum dan melahirkan pembagian tugas dalam segi menejemen.

Kedua, dengan dimasukkannya sistem sekolah dalam pesantren dengan penjenjangan ketat, maka kurikulum pun sekarang ini tidak lagi menjadi monopoli keputusan kiai. Kurikulum pendidikan di pesantren yang sudah memasukkan sistem sekolah, di samping menyesuaikan dengan kurikulum sekolah negeri juga digenapi dengan materi-materi pesantrenan yang dalam beberapa kasus telah didelegasikan oleh kiai kepada pengurus bidang pendidikan. Dengan demikian, sangat mungkin masuknya materi-materi baru, yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan di pesantren.

Adapun fokus tulisan ini adalah pada nilai kebebasan yang muncul dalam pendidikan di pesantren Nurul Ummah, baik yang tercermin dalam proses pembelajaran maupun interaksi antar sivitas pesantren seperti antara sesama santri, santri dengan ustadz, santri dengan kiai, antara sesama ustadz, dan antara ustadz dengan kiai.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: (1) Nilai-nilai kebebasan apa saja yang hidup, operasional dan berkembang dalam pendidikan di pesantren Nurul Ummah?; (2) Mengapa nilai-nilai kebebasan tersebut hidup, dapat berfungsi dan berkembang di pesantren?; dan (3) Faktor apa saja yang mendukungnya?

## B. Nilai-nilai Demokrasi (Nilai Kebebasan)

Kata "nilai" (*value*) merupakan kata jenis yang meliputi segenap macam kebaikan dan sejumlah hal yang lain.<sup>14</sup> Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap bermakna bagi kehidupan seseorang yang dipertimbangkan berdasarkan kualitas benar-salah, baik-buruk, indah-tak indah, dan orientasinya bersifat *antroposentris* dan *theosentris*.<sup>15</sup> Menurut Bertens nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang

<sup>14</sup> Katsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, terjemah Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 327.

<sup>15</sup> Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 117-118.

disukai dan diinginkan. Singkatnya, nilai adalah sesuatu yang baik.<sup>16</sup> Namun demikian nilai mencakup pengertian yang lebih luas lingkungannya dibandingkan dengan pengertian “yang-baik”, dan pengertian tersebut menyangkut perangkat hal yang disetujui dan yang tidak disetujui.<sup>17</sup>

Nilai memiliki kedekatan dengan perasaan, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengandalkan. Perasaan merupakan aktivitas psikis di mana manusia menghayati nilai. Sesuatu yang bernilai bagi seseorang adalah jika menimbulkan perasaan positif seperti senang, suka, simpati, gembira, tertarik. Adapun sesuatu yang tidak bernilai akan menimbulkan perasaan negatif seperti tidak senang, tidak suka, marah, jijik, benci, antipati. Pengalaman dan pengamalan/penghayatan nilai selalu melibatkan hati atau hati nurani dan budi. Hati menangkap nilai dengan merasakannya dan budi menangkap nilai dengan memahami atau menyadari.<sup>18</sup>

Nilai dapat dipersepsi sebagai kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda nilai diwakili sejumlah kata benda abstrak misalnya keadilan, kejujuran, kebaikan, kebenaran, dan tanggung jawab, sedangkan nilai sebagai kata kerja berarti suatu usaha kesadaran diri yang ditujukan pada pencapaian nilai-nilai yang hendak dimiliki. Dalam teori nilai, sebagai kata benda, nilai banyak dijelaskan dalam klasifikasi dan kategorisasi nilai, dan nilai sebagai kata kerja dijelaskan dalam proses perolehan nilai, yang berarti nilai yang diusahakan bukan sebagai harga yang telah diakui keberadaannya.

Menurut G.E. Moore dan A.C. Ewing, nilai tidak dapat dipersamakan dengan pengertian-pengertian yang setara. Tetapi nilai dapat didefinisikan dengan cara-cara lain, umpamanya dengan jalan menunjukkan contohnya, dan secara demikian dapat diketahui secara langsung. Dengan kata lain nilai merupakan kualitas empiris, yaitu kualitas yang diketahui atau dapat diketahui melalui pengalaman.<sup>19</sup>

Menurut idealisme, nilai-nilai ada dalam kenyataan, namun tidaklah bereksistensi. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi-esensi, yang terkandung dalam barang sesuatu serta perbuatan-perbuatan. Sebagai esensi, nilai tidak bereksistensi, namun ada dalam kenyataan.

---

<sup>16</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 139

<sup>17</sup> Katsoff, Louis O. , *Pengantar Filsafat*, hlm. 328

<sup>18</sup> Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, hlm. 36-37

<sup>19</sup> Katsoff, Louis O. , *Pengantar Filsafat*, hlm. 334

Nilai-nilai dapat dikatakan mendasari barang sesuatu dan bersifat tetap. Jika orang mengatakan "Perdamaian merupakan sesuatu yang bernilai", maka ia memahami bahwa di dalam hakekat perdamaian itu sendiri terdapat nilai yang mendasarinya.

Menurut Max Scheler, nilai merupakan sesuatu kenyataan yang pada umumnya tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain. Atau dapat dikatakan sebaliknya, kenyataan lain merupakan pembawa nilai seperti halnya suatu benda dapat menjadi pembawa warna merah atau pembawa warna lainnya.<sup>20</sup>

Scheler menegaskan bahwa nilai-nilai itu sungguh-sungguh merupakan kenyataan yang benar-benar ada, bukan hanya "kita anggap ada". Karena nilai itu benar-benar ada, walaupun tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain, bukan berarti tidak sama sekali tergantung pada kenyataan-kenyataan lain itu, sebab meskipun kenyataan-kenyataan lain yang "membawa nilai-nilai" itu berubah dari waktu ke waktu, nilai-nilai itu sendiri bersifat mutlak, tak berubah. Di balik dunia yang tampak ini, menurut Max Scheler tersembunyi dunia nilai-nilai yang amat kaya. Karena itu, ia menolak kecenderungan beberapa pemikir yang mengembalikan semua nilai pada beberapa atau bahkan hanya kepada satu nilai saja, misalnya disebut "kesejahteraan umum"

Nilai-nilai demokrasi adalah seperangkat nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suasana kehidupan yang demokratis dalam sebuah komunitas. Menurut Asykuri Ibn Chamim, dkk, nilai-nilai demokrasi meliputi: kebebasan, menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan.<sup>21</sup> Kebebasan bisa dibedakan ke dalam beberapa macam, seperti: kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, dan kebebasan berpartisipasi.

### C. Gambaran Umum Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede

Pondok Pesantren Nurul Ummah (PPNU) terletak di jalan Raden Ronggo 982, Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Pesantren tersebut didirikan oleh KH. Ahmad Marzuqi

---

<sup>20</sup> Max Scheler, "Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik", dalam Al Purwo hadiwardoyo, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 32

<sup>21</sup> Asykuri Ibn Chamim dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan, Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, The Asia Foundation, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003), hlm. 81



Romly pada tanggal 9 Februari 1986 di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Pendirian pesantren ini, pada hakikatnya dilandasi oleh rasa tanggungjawab pribadi dan sosial KH. Ahmad Marzuqi Romly untuk menyeru kepada kebajikan, mencegah kemungkaran dan membina serta mendidik umat dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Nama Nurul Ummah merupakan usulan dari H. Ahmad Arwan Bauis, SH., yang kemudian disetujui para peserta musyawarah bersama pengurus Yayasan Pendidikan Bina Putra Yogyakarta.<sup>23</sup> Dengan nama "Nurul Ummah" yang berarti "Cahaya Ummah" diharapkan pondok pesantren tersebut bisa menjadi

<sup>22</sup> KH. Ahmad Marzuqi lahir di desa Giriloyo Wukirsari Imogiri. Beliau adalah putra kelima dari KH. Romli, seorang ulama yang menjadi mursyid tarekat Syathariyah. Sejak usia 4 tahun Ahmad Marzuqi telah dididik secara khusus oleh ayahnya untuk menggantikan perjuangan yang telah dirintisnya, mendidik orang-orang untuk lebih dekat pada Allah. Pada tahun 1905 Ahmad Marzuqi dikirim ke PP. Kanggotan Pleret Bantul di bawah bimbingan Kiai Zaini. Setelah lima tahun belajar di pesantren tersebut, beliau dikirim ke pesantren Termas Pacitan Jawa Timur di bawah bimbingan KH. Hafidz Dimiyati, selama empat tahun (1910-1914). Dari pesantren Termas, Ahmad Marzuqi melanjutkan pendidikan di PP Watucongol Muntilan Magelang (1915-1918), di bawah bimbingan KH. Dimiyati. Dari Watucongol, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di PP. Somolangu Kebumen Jawa Tengah (1919-1922), di bawah bimbingan KH. Abdurrauf. Di PP. Somolangu Ahmad Marzuqi mendapat kepercayaan untuk mengajar santri (menggantikan kiai/badal) bila kiai sedang berhalangan atau sakit. Kepercayaan itu dilakukannya dengan tekun dan ikhlas, sehingga akhirnya beliau semakin menguasai ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok-pondok sebelumnya. Sepulang dari PP. Somolangu (tahun 1922), Ahmad Marzuqi melanjutkan pendidikannya di PP. Lirap Kebumen Jawa Tengah (1922-1925). Walaupun sudah mahir membaca kitab, namun beliau tidak bosan untuk mendalami kitab-kitab yang telah dikajinya terdahulu. Pada tahun 1926-1927, beliau pindah ke PP. Jamsaren Solo Jawa Tengah, di bawah bimbingan KH. Idris. Sepulang dari PP. Jamsaren, beliau menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kalinya. Sepulang dari tanah suci, beliau melanjutkan pendidikannya di PP. Krapyak Yogyakarta (1927-1931), di bawah pimpinan KH. Moenawir untuk mewujudkan cita-cita menghafal al-Qur'an 30 Juz

<sup>23</sup> Yayasan Pendidikan Bina Putra Yogyakarta adalah Yayasan yang menaungi pondok pesantren Nurul Ummah yang sudah berdiri terlebih dahulu. Yayasan ini didirikan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1402/8 Januari 1982 oleh RH. Suwardiyono, BA. Yayasan inilah yang kemudian bertindak sebagai pelaksana dan pengelola pembangunan PPNU pada masa-masa awal. Setelah RH. Suwardiyono wafat, kepengurusan yayasan diamanatkan kepada Drs. KH.M. Djalaluddin, S.H., sebagai ketua dan Muhammad Hasyim, SH., M.Hum., sebagai sekretaris. Tim Revisi, *Panduan Pondok Pesantren Nurul Ummah*, (Yogyakarta: Sekretariat PPNU, 2005), hlm. 2

lembaga tempat mendalami agama (*tafaqquh fiddin*) yang mampu memberikan sinar pencerahan dan mengarahkan umat Islam dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*al-sa'adah fi al-darayn*). Sebagai sebuah lembaga pendidikan, secara legal formal PPNU telah terdaftar di Departemen Agama pada tanggal 9 Juli 1986 dengan nomor: A. 8655.<sup>24</sup>

Dasar penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan PP. Nurul Ummah adalah amar ma'ruf nahi munkar, ketaqwaan, kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai agama, keikhlasan dalam mengemban amanat Ilahi, kesederhanaan, dan saling menolong terhadap sesama manusia serta menjaga citra hubungan antar sesama manusia serta hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta.

Secara lebih rinci, tujuan dari didirikannya PP. Nurul Ummah adalah: (1) Membentuk dan mengembangkan generasi muslim kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., berakhlak mulia, sehat terampil, patriotik dan beramal saleh; (2) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melal pendekatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan bangsa; (3) Berpartisipasi aktif-kritis serta memberikan nuansa terhadap fenomena masyarakat yang terjadi; (4) Menegakkan ajaran Islam yang murni dengan menempuh manhaj (metode) *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>25</sup>

Sepeninggal KH. Ahmad Marzuqi, KH. Asyhari Marzuqi menggantikan posisi beliau sebagai pengasuh di PP. Nurul Ummah. KH. Asyhari Marzuqi lahir di Giriloyo pada hari Selasa Kliwon 10 November 1939 atau tanggal 1 Dzulqa'idah 1361 H. Pada tahun 1949, Asyhari Marzuqi masuk Sekolah Rakyat (SR) di Singosaren Wukirsari. Lulus dari SR tahun 1955, Asyhari langsung ke Krapyak. Di pesantren tersebut beliau mengikuti jenjang pendidikan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, meski tidak secara normal, karena untuk setiap jenjang hanya ditempuh dua tahun. Setamat dari Madrasah Aliyah (1961), beliau melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada saat studi di IAIN beliau pernah menjadi asisten Prof. Hasbi Asshiddiqie dalam mata kuliah bahasa Arab, Nahwu dan Shorf.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tim Revisi, *Panduan Pondok Pesantren Nurul Ummah*, (Yogyakarta: Sekretariat PPNU, 2005), hlm. 28

Setamat dari IAIN (1970), Asyhari Marzuqi ke Timur Tengah (Irak) dengan maksud meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-2). Di sana beliau bertemu dengan Gus Dur dan KH. Irfan Zidni (alm). Di Irak, beliau bergabung dengan lembaga "Kulliyatul Imam al-A'zham" untuk memperdalam pengetahuannya. Lembaga tersebut merupakan kelompok pengajian yang didirikan oleh murid Imam Abu Hanifah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kulliyatul Imam al-A'zham, Asyhari Marzuqi bekerja di kedutaan Besar RI di Iraq, sebagai penerjemah surat kabar Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Sepulang dari Timur Tengah beliau menikah dengan Hj. Barokah, putri ke 5 dari KH. Nawawi Abdul Aziz, pengasuh PP. An-Nur Ngrukem Bantul. Oleh ayahndanya, KH. Marzuqi, beliau diberi amanat untuk mengasuh PP. Nurul Ummah. Selain mengasuh pondok pesantren, KH. Asyhari Marzuqi juga memiliki jaringan luas dengan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Beliau juga dekat dengan organisasi sosial politik yang memiliki basis masa NU, yakni PKB. Namun demikian, secara formal KH. Asyhari Marzuqi tidak pernah memihak kepada salah satu partai politik yang ada. Sikap demikian itulah yang menjadikan beliau disegani dan dekat dengan semua kalangan, khususnya di internal Nahdlatul Ulama, maupun dengan kalangan Islam modernis, terutama Muhammadiyah. Sepeninggal KH. Asyhari Marzuqi pada tahun 2004, posisi beliau digantikan oleh KH. Agus Muslim Nawawi, adik kandung Nyai Hj. Barokah Asyhari.<sup>26</sup>

Sejak berdirinya pesantren Nurul Ummah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut jika dipetakan dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa periode. *Pertama*, Periode Awal (1986-1991). Periode ini ditandai dengan dimulainya kegiatan pengajian untuk masyarakat di sekitar pondok pada pertengahan bulan Rajab 1406 H. Pengajian itu bertempat di pendopo rumah Kiai dan diselenggarakan pada setiap malam Rabu dan Ahad pagi dengan tujuan mendekatkan Pondok Pesantren dengan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>26</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang santri senior, bahwa sampai wafatnya, perkawinan antara alm. KH. Asyhari Marzuqi dengan Nyai Hajjah Barokah belum dikaruniai anak. Akhirnya keduanya sepakat untuk mengambil anak angkat sebagai calon penerus kelangsungan dari kepemimpinan pondok pesantren Nurul Ummah. Tetapi sampai saat ini, putra angkatnya belum menginjak usia dewasa., sehingga sebagai penggantinya ditunjuk KH. Agus Muslim Nawawi.

Selain itu Pesantren Nurul Ummah juga mulai menerima santri, meski hanya untuk program khusus di bulan Ramadhan. Santri Ramadhan yang pertama terdiri atas 23 orang santri Putra. Mereka menempati ruang asrama yang masih dalam tahap penyempurnaan. Selain santri putra juga ada 5 orang santri putri yang tinggal serumah dengan keluarga kiai. Kegiatan pengajian perdana dimulai pada tanggal 15 Syawwal 1406 H. Sistem yang digunakan adalah *bandongan* dan *sorogan*, dengan materi *al-Qur'ān* dan kitab kuning.

Pada bulan Syawal 1407 H, PPNU mulai mengembangkan sistem klasikal sebagai pendukung sistem *bandongan* dan *sorogan*. Sistem klasikal diterapkan karena jumlah santri masuk ke pesantren Nurul Ummah semakin meningkat dengan bekal pengetahuan agama yang bervariasi. Sistem klasikal dibuat berjenjang, yaitu jenjang kelas persiapan dua tahun dan kelas madrasah empat tahun (kelas I sampai kelas IV).

Bagi santri putri juga ada pengelolaan tersendiri, sehingga sering dikenal sebagai Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri (PPNU-Pi). Lokasi PPNU Putri sama dengan PPNU Putra, yaitu di desa Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi untuk santri putri tempatnya di sebelah barat ndalem Pengasuh, atau berada tepat di sebelah selatan masjid Al-Faruq. PPNU-Pi diasuh langsung oleh ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari.

Seiring berkembangnya Pondok Pesantren Nurul Ummah, semakin banyak pula santri putri yang berdatangan untuk menimba ilmu di pesantren tersebut. Maka PPNU-Pi mengalami beberapa kali perubahan dalam proses pencarian bentuk dengan perkembangannya dan dinamikanya. Kajian khusus untuk santri putri dimulai pada Bulan Ramadhan 1406 H. Sistem *sorogan*, *bandongan*, dan *weton*. Pada masa ini kajian dilakukan secara non-klasikal. Pada saat itu di PPNU-Pi juga belum terbentuk kepengurusan secara resmi, tetapi hanya ditunjuk seorang koordinator, yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan.

*Kedua*, Periode Kedua (1991-1995). Periode kedua ditandai dengan berdirinya Madrasah Diniyah Nurul Ummah (MDNU) pada tahun 1411 H / 1991 M. Dengan berdirinya MDNU maka sejak tahun 1991 di PPNU terdapat dualisme kepengurusan dalam satu atap: MDNU mengelola sistem madrasah, sedangkan Ikatan Santri Nurul Ummah (ISNU) menangani pengajian santri dan kegiatan lain di luar kegiatan madrasah diniyah. Untuk mengatasi dualisme kepengurusan, pada tahun 1995 dilakukan fusi kepengurusan dalam satu wadah Pengurus Pondok Pesantren Nurul Ummah.

Perkembangan jumlah santri putri yang semakin meningkat secara kuantitatif akhirnya juga memotivasi berdirinya Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri.

*Ketiga*, Periode Ketiga (1995-sekarang). Pada fase ini PPNU telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi sarana maupun kuantitas santrinya. Secara kuantitas jumlah santri pada tahun ajaran 2007/2008 ada 197 orang dengan rincian: kelas awaliyah (1-4) ada 116, kelas wustho ada 44 santri, dan kelas ulya ada 38 santri.

#### D. Nilai Kebebasan dalam Pendidikan di Pesantren

Menurut Cak Nur, salah satu karakteristik manusia sehingga bermartabat sebagai puncak ciptaan Tuhan ialah adanya kemampuan untuk mengenali sesuatu sebagai benar dan salah atau baik dan buruk kemudian berkebebasan untuk menerima atau menolaknya. Kebebasan tersebut merupakan amanat Allah, yang dalam al-Qur'an digambarkan sebagai pernah ditawarkan kepada seluruh alam kebendaan di jagad raya ini, namun semua menolak dan berkeberatan, lalu ditawarkan kepada Manusia, dan manusia bersedia menerimanya.<sup>27</sup>

Islam adalah agama yang mengklaim membawa kebebasan bagi umat manusia, terlepas dari jenis kelamin, ras, bangsa dan budaya.<sup>28</sup> Hal ini tercermin dalam dua hal. Pertama, pernyataan dalam al-Qur'an, yaitu: pertama, bahwa tidak ada paksaan dalam agama, *la ikraha fiddin* ("Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam", al-Baqarah: 256). Pernyataan ini merupakan aturan utama terkait dengan hak asasi yang tidak bisa diingkari. Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa *faman syaa fal yu'min wa* dengan model pembelajaran kitab, ia berhak menyampaikan keluhan-keluhan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengelola pesantren.

Pada pesantren Nurul Ummah kebebasan berpendapat telah masuk ke dalam proses pembelajaran, baik pada saat jam musyawarah kitab maupun jam-jam kajian kitab yang lain. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran yang dilakukan, menunjukkan

<sup>27</sup> Nurcholis Madjid, "Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme Islam" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Ed.), *Passing Over, Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1998), hlm. 8

<sup>28</sup> Ulil Abshor Abdalla, "Islam dan Kebebasan" dalam Hamid Basyaib (Ed.), *Membela Kebebasan, Percakapan Tentang Demokrasi Liberal* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 223

bahwa ustadz selalu memberikan kesempatan kepada para santri untuk bertanya dan berargumentasi guna menanggapi persoalan yang diajukan ustadz. Kondisi demikian ditemukan baik pada jenjang rendah maupun tinggi.<sup>29</sup> Tetapi yang terlihat intens, khususnya di pesantren Nurul Ummah, adalah pada jenjang atau kelas wustho dan ulya. Hal ini diperkuat pernyataan ustadz Sigit Purnomo, bahwa hampir semua mata kajian di MDNU sejak di kelas wustho atau ulya memberikan kesempatan yang cukup kepada santri untuk berpendapat atau berargumentasi. Sebelum ustadz menjelaskan, para santri lebih dahulu disuruh membaca, mengartikan dan menyampakan pemahamannya terhadap teks kitab, sebelum akhirnya ustadz meluruskan pembacaan, cara mengartikan dan pemahaman dari para santri.<sup>30</sup>

Sebagaimana dikatakan Zamroni, dalam proses pembelajaran, yang penting memang bukan apa materi yang diajarkan ataupun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. Terkait dengan bagaimana suatu materi diajarkan akan menimbulkan iklim kelas (*classroom climate*). Iklim kelas yang

---

<sup>29</sup> Hasil pengamatan pembelajaran baik di PP. PUTM maupun di PP. Nurul Ummah, Maret 2007.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Sigit Purnomo, Waka MTsNU PPNU Kotagede, Maret 2008. Hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran di pesantren Nurul Ummah baik pada kelas awaliyah, wustho dan ulya memang menguatkan pernyataan Sigit Purnomo. Misal, dalam pembelajaran fiqh mawaris yang diampu oleh ustadz Kholis. Setelah membuka dengan salam, ustadz memberikan sedikit penjelasan tentang posisi kakek dalam pewarisan, dengan ilustrasi gambar di papan tulis. Setelah itu ustadz menyuruh salah seorang santri untuk membaca kitab, kelanjutan dari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Santri yang sudah diberi tugas segera membaca kitab dan mengartikannya. Setelah selesai ustadz membaca ulang apa yang telah dibaca santri, mengartikan dan menjelaskan maksud dengan memanfaatkan papan tulis sebagai media. Ustadz juga meminta santri untuk mencermati ketentuan waris yang ada pada lembar foto copian (Tabel Pembagian Waris dan Masalah-masalah Khusus seperti kakek bersama saudara, *mu'addah*, *akdariyah*, *musyarrokah*, *umariyatain*, dll. Yang diambil dari *Al-Fiqhul Manhaji* juz 5 karya Dr. Musthofa Al-Khin dan Dr. Musthofa Al-Bugho) yang telah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Setelah memberikan penjelasan beberapa saat, ustadz memberi kesempatan kepada santri untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum dipahami. Salah seorang santri segera mengajukan pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan ustadz memberi kesempatan kepada santri lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu ustadz memberikan penjelasan secukupnya. Setelah penjelasan dirasa cukup, menunjuk salah seorang santri yang akan bertugas untuk membaca dan mengartikan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan diakhiri dengan bersama-sama membaca hamdallah, dan ditutup dengan salam. Hasil pengamatan pembelajaran fiqh mawaris kelas wustho 1, Maret 2007.

terbuka dan longgar sangat kondusif bagi munculnya nilai kebebasan berpendapat atau berekspresi, sebab dalam iklim semacam itu suasana kelas akan bersifat demokratis sehingga proses belajar akan dinamis. Dalam iklim kelas yang terbuka dan longgar, ustadz maupun santri bisa mengajukan "controversial issue" ke dalam kelas untuk didiskusikan dan dikaji oleh para santri. Santri memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankannya, tetapi santri juga akan belajar untuk menghargai pendapat orang lain, meski pendapat tersebut berbeda dengan apa yang dimiliki, bahkan apa yang diyakini.<sup>31</sup>

Adapun untuk pesantren Nurul Ummah, *controversial issue* nampaknya memang belum ditemukan, tetapi paling tidak dalam proses pembelajaran telah dimunculkan contoh-contoh dekat yang digunakan untuk memperjelas maksud kitab. Misal yang dilakukan ustadz Samito ketika menjelaskan *ijtihad jama'i* yang kemudian menghasilkan *ijma'*. Ketika dalam teks kitab disebutkan, bahwa pada masa khalifah Umar bin Khattab *ijtihad jama'i* pernah dilakukan oleh para sahabat, beliau juga mencontohkan keberadaan MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang di dalamnya berhimpun para ulama dari berbagai organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan yang tidak ada dasar hukumnya.<sup>32</sup>

Pemberian otonomi kepada qari'/qari'at dalam menjalankan proses pendidikan merupakan langkah yang baik, karena menjadikan qari'/qari'at memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Mereka akan memiliki kebanggaan atas sukses yang dicapai dan sebaliknya mereka merasakan kepedihan yang mendalam akan kegagalan yang dialami para santri. Hal ini akan menimbulkan komitmen untuk bekerja memberikan yang terbaik.

Meningkatnya otoritas yang dimiliki ustadz/qari'/qari'at untuk mengendalikan proses pendidikan, memungkinkan mereka menggunakan seluruh kemampuan profesional dan pengalaman mereka dalam melaksanakan tugasnya. Mereka memiliki kebebasan untuk melaksanakan tugas dengan cara yang mereka anggap baik dan dapat meningkatkan efisiensi kerjanya. Dampak selanjutnya, mereka akan melaksanakan pengajaran yang menekankan pada pemahaman yang bermakna dan pembelajaran yang otentik (*authentic learning*) dari pada pengajaran yang hanya mentransfer pengetahuan untuk dihafalkan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Lihat, Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi....*, hlm. 44-45

<sup>32</sup> Hasil pengamatan pembelajaran Tarikh Tasyri' yang diampu ustadz Samito, 8 April 2008.

<sup>33</sup> Lihat, Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi....*, hlm.

Di pesantren Nurul Ummah, kegiatan *bahs\ul masa>'il* juga berjalan dengan baik. Topik yang dibahas dalam *bahs\ul masa>'il* yang dilaksanakan di pesantren Nurul Ummah sangat beragam, dan selalu diusahakan aktual, meski tampak sederhana.<sup>34</sup> Selain itu, kebebasan berpendapat melalui tulisan tersalur melalui media yang diterbitkan pesantren. Kritik secara tertulis sebagai wujud dari kebebasan berpendapat bahkan mendapatkan saluran yang sangat memadai. Setidaknya ada tiga media milik pesantren yang bisa menampung aspirasi santri, yaitu: majalah Tilawah, bulletin Mascott, dan Koran Nurul Ummah.

Misal, melalui bulletin Mascott Abdul Azis mengatakan bahwa lulusan yang dihasilkan MDNU baru mempunyai kemampuan setengah-setengah sebagai akibat dari dominannya ilmu dari luar diniyyah, yang diperoleh dari kampus.

*"Kebanyakan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz adalah ilmu dari kampus atau ilmu yang di dapat dari luar diniyyah walaupun ada dari diniyah mungkin terbilang masih sedikit. Memang dalam pergulatan perkampusan dan persaingan intelektual modern lulusannya bahkan santri yang dihasilkan MDNU cukup bagus. Namun ketika mengajar dengan berpegangan kitab klasik, MDNU belum menghasilkan lulusan setangguh pondok-pondok salafi. Lulusan kita masih saja membuka terjemahan atau mungkin kitab pethukan yang diterjemahkan oleh pondok lain. Lalu seberapa besar andil ilmu yang diberikan MDNU?"<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> Permasalahan yang terkait dengan haji yang pernah diangkat dalam *bahtsul masa'il* di pesantren Nurul Ummah adalah "penggunaan uang setoran ONH yang ada di Bank oleh pemerintah untuk kemasahatan umum" dan "penundaan ibadah haji dengan alasan nasih dipakainya ONH untuk proyek umum", dengan pertanyaan: (a) Bolehkah penggunaan uang setoran ONH yang ada di Bank dipakai pemerintah untuk kemasalahan umum seperti membuat jalan tol, lapangan olah raga, rumah sakit dll ?; (b) misalnya terjadi penundaan pemberangkatan haji oleh pemerintah dalam satu atau dua tahun ke depan dengan alasan bahwa ONH masih dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan umum sebagaimana tersebut di atas, bisakah penundaan itu menempati kedudukan hukum belum mampu berangkat haji dalam konsep *istatho'a ilai sabila* sehingga jama'ah tidak mendapatkan tuntutan wajib berangkat saat itu?; (c) sebenarnya bagaimana konsep *istatho'a* dalam kaitanya dengan hukum sosial kenegaraan seperti itu?, bukankah kalau dibandingkan dengan kondisi sosial keamanan dan politik, seseorang bisa diperbolehkan tidak atau menunda pemberangkatan ibadah haji bila kondisi tempat tinggal, negara, atau jalan yang di tempuh dinilai tidak aman?, maka bisakah penundaan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum tadi, termasuk kategori di perbolehkan menunda pemberangkatan?; (d) apakah memang ada konsep *to jil* ( bersegera berangkat ibadah haji) dalam persoalan kewajiban haji?. Dikutip dari dokumen Laporan Syahriah PP Nurul Ummah 2005, pada tanggal 15 April 2007.

<sup>35</sup> Aziz Anwar F., "Menyoal Kapabilitas MDNU Menggembleng Santri" dalam Bulletin Mascott PP. Nurul Ummah



Santri lain, Aziz Anwar, juga memberikan kritik atas sistem pembelajaran di pesantren Nurul Ummah. Menurut Aziz Anwar, sistem pembelajaran di pesantren Nurul Ummah memang masih lebih unggul dibanding sistem pembelajaran pondok salaf, baik dilihat dari kurikulum yang terprogram atau dari sistem musyawarah yang sangat bagus untuk pembekalan santri belajar menyampaikan pendapatnya. Berbeda dengan sistem salafi yang berprinsip kalau belum pernah dibacakan oleh ustadz maka santrinya pun tidak mau mengajarkannya, artinya semua ilmu yang didapat adalah ilmu murni dari guru dan tidak ada sanggahan sedikitpun. Sistem pendidikan yang dimiliki MDNU sangat menghargai keterbukaan. Tetapi menurutnya masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Pertama, mayoritas kitab yang ada di diniyyah dibaca dan diterjemahkan oleh santri, yang belum tentu bacaan itu benar. Lebih fatal lagi kalau ustadznya tidak tahu bahwa bacaan itu salah karena masih rendahnya kemampuan nahwu-saraf yang dimiliki serta masih adanya ketergantungan dengan terjemahan. Kedua, jaranganya kitab diniyyah di MDNU yang dapat khatam dan tuntas.<sup>36</sup>

*"Sungguh sangat memalukan ketika sudah lulus dan ditanyai oleh masyarakat apakah anda sudah khatam Fathul Qarib, 'Imrity, Jalalain? Jawabannya adalah belum. Padahal itu semua adalah kitab pokok yang mestinya setiap lulusan pondok pesantren yang menitik beratkan pada pendalaman kitab bisa mengkhatakannya".<sup>37</sup>*

Kritik lain dikemukakan oleh Halimatus Sya'diyah terkait dengan kebijakan pelarangan *hand phone* di pondok pesantren Nurul Ummah putri. Melalui rubrik opini dalam Koran Nurma ia mengatakan:

*".....kita yang hidup di zaman serba elektronik ini, HP merupakan kebutuhan pokok yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri, sehingga komunikasi sangatlah penting bagi kita. Apalagi mayoritas santri di PP. NURMA adalah mahasiswa yang tidak mungkin terlepas dari dunia luar. Tidak mungkin jika dalam berkomunikasi dengan kerabat ataupun relasi hanya menggunakan telephone umum atau ke Wartel. Hal ini kurang efektif dan akan memboroskan, sehingga dari kalangan santri mahasiswa berinisiatif untuk menitipkan HP di tempat penitipan HP, teman, atau kerabatnya. Tetapi apakah seterusnya kita akan menitipkan HP di tempat orang lain? Di tempat penitipan HP, walaupun si pemilik tempat memperlihatkan sikap yang biasa saja, tetapi apa kita tidak merasa kurang enak dan merasa sungkan pada tuan rumah jika setiap hari kita keluar masuk rumah orang silih berganti? Apa pendapat orang sekitar tentang hal ini?"<sup>38</sup>*

<sup>36</sup> Aziz Anwar F., "Menyoal Kapabilitas MDNU Menggembelng Santri", dalam Bulletin Mascott PP. Nurul Ummah

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Halimatus Sadiyah, "Hand Phone: Antara Aturan dan Kebutuhan" dalam Koran Edisi 17 Th 1, 26 Januari 2008, hal. 4

Deskripsi di atas, setidaknya memberikan informasi bahwa dalam pendidikan di pesantren Nurul Ummah ada ruang kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Pada pesantren Nurul Ummah bahkan memiliki media seperti majalah, buletin dan majalah dinding yang bisa digunakan untuk melakukan kritik sosial.<sup>39</sup> Melalui media tersebut, santri sekaligus dapat mengaktualisasikan kemampuannya dalam penguasaan keilmuan dalam bidang tertentu. Menurut Karl Mannheim, bila kemajuan ilmu pengetahuan dipakai sebagai landasan suatu kritik sosial maka faktor yang tidak terkontrol (*uncontrolled factor*) menjadi semakin berkurang dan faktor rasional yang terkontrol menjadi semakin meningkat sehingga bobot suatu kritik sosial semakin terjamin akurasinya.<sup>40</sup>

Kedua, Kebebasan Berekspresi. Dalam kebebasan berekspresi sebenarnya tercakup kebebasan berpendapat. Tetapi dalam konteks ini kebebasan berekspresi lebih dispesifikkan pada ekspresi dalam bidang seni dan sastra.

Dalam kehidupan modern kebebasan berekspresi mempunyai nilai yang penting, karena dunia modern dibangun dengan semangat rasionalitas. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu sarana untuk membangun rasionalitas dan mencari apa yang paling rasional. Artinya kalau orang berkompetisi di dalam pendapat dan ekspresi, apa yang keliru dan terbelakang menjadi tampak, sehingga kemajuan menjadi terukur. Modernitas adalah kemajuan, penemuan, perkembangan ke arah kehidupan yang lebih baik. Maka kebebasan berekspresi pada dasarnya sama dengan pelaksanaan rasionalitas sendiri.<sup>41</sup> Bahkan Khaled Abou el-Fadl menegaskan, bahwa demokrasi dengan memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk berekspresi, berkumpul, dan menggunakan hak pilih, menawarkan peluang yang paling besar untuk menjunjung keadilan dan melindungi martabat manusia, tanpa menjadikan Tuhan sebagai

---

<sup>39</sup> Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dalam konteks inilah kritik sosial merupakan variabel penting dalam memelihara sistem sosial. Ahmad Zaini Akbar, "Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia" dalam Moh. Mahfud MD, dkk. (Ed.), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.47

<sup>40</sup> Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), hlm. 171 sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD, "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial" dalam Moh. Mahfud MD, dkk. (Ed.), *Kritik Sosial Wacana Pembangunan* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 73

<sup>41</sup> Nirwan Dewanto, "Kebebasan Berekspresi dan Pornografi", dalam Hamid Basyaib (Ed.), *Membela Kebebasan, Percakapan Tentang Demokrasi Liberal* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 273

pihak yang bertanggungjawab atas ketidakadilan yang diderita manusia.<sup>42</sup>

Dalam dunia kesenian, kebebasan berekspresi memenuhi perkembangan seni, sebab dasar-dasar perkembangan seni adalah ciptaan seni yang dibuat berdasarkan kebebasan berekspresi. Dalam arti luas, kebebasan berekspresi adalah suatu cara (bukan tujuan) untuk menggali sumber-sumber kesenian secara lebih baik; untuk menjelajah sejauh-jauhnya. Sebab kesenian tidak lain adalah cara menciptakan gambaran dunia yang baru melalui fakultas yang lebih intuitif. Berbeda dengan dunia ilmu yang menciptakan gambaran dunia yang baru melalui fakultas yang lebih rasional.<sup>43</sup>

Melalui seni kehidupan sosial yang tertopengi akan ditampilkan ke permukaan. Seni akan berterus terang mengungkapkan apa yang tertopengi, karena alat-alat dalam bidang lain tidak mungkin mengungkapkannya. Oleh karenanya kebebasan berekspresi bisa menjadi pendorong, bahkan bisa menjadi ukuran bagi kemajuan masyarakat. Makin bebas orang berekspresi di bidang kesenian, berarti masyarakat itu makin maju.<sup>44</sup>

Memang ada sementara pihak, misal dari sebagian agamawan, yang percaya bahwa citraan atau gambaran masa depan yang lebih baik itu sudah mereka miliki, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mencarinya melalui kesenian. Pandangan demikian juga ada pada pengelola pesantren, yang hal itu tercermin dari berkembang tidaknya kesenian dalam pesantren bersangkutan.

Pada pesantren Nurul Ummah media sebagai ekspresi seni mendapatkan porsi yang cukup. Di sana ada seni musik, seni hadrah, seni baca al-Qur'an, seni teater (sanggar Sangkakala), seni sastra, dan seni retorika.

*Ketiga, Kebebasan Berkelompok.* Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga Negara. Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk membentuk organisasi dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tidak mungkin diingkari. Masyarakat primitif pun berkelompok dalam mencari makan dan perlindungan dari kejaran hewan liar maupun kelompok lain yang akan berbuat jahat. Dalam era modern, kebutuhan berkelompok terlihat tumbuh semakin kuat. Hal tersebut dipicu

---

<sup>42</sup> Khaled Abou el Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Gita Ayu Rahmani dan Ruslani (Jakarta: Ufuk, 2004), hlm. 12

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.274

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.275

oleh semakin kompleksnya persoalan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga memerlukan kelompok atau organisasi untuk menemukan jalan keluar.

Pesantren sebagai miniatur masyarakat sebenarnya juga merupakan sebuah kumpulan berbagai komunitas kecil yang membentuk sebuah komunitas besar. Oleh karenanya sesederhana kayak apapun kehidupan dalam pesantren di sana selalu ada kelompok. Jika kelompok tersebut bukan merupakan sebuah organisasi yang resmi dan mewakili seluruh santri, setidaknya ada kelompok yang dikenal dengan istilah komunitas kompleks. Dalam sebuah kompleks biasanya terdiri dari beberapa komunitas kamar, karena setiap kamar biasanya terdiri dari banyak penghuni sehingga memiliki kepengurusan tersendiri.

Pada pesantren Nurul Ummah media bagi santri untuk berkelompok cukup beragam. Ada banyak lembaga yang muncul di PPNU, yang siap mewedahi dan mengembangkan potensi santri. Di antaranya adalah Unit Kegiatan Santri (UKS) Jamiyah Qurra wal Hufadz (JQH)<sup>45</sup>, Sanggar Sangkakala<sup>46</sup>, majalah Tilawah<sup>47</sup>, bulletin Mascott, LP2M<sup>48</sup>, Koran Nurma, majalah dinding As-Syibaq<sup>49</sup>,

---

<sup>45</sup> UKS JQH merupakan lembaga yang menangani kegiatan Seni baca al-Qur'an yang sering dikenal dengan istilah *Tilawatil Qur'an* ini mempelajari *tausiyah* atau lagu-lagu dan membaca al-Qur'an. Diadakan untuk membina para *qari'* mulai dasar atau pengembangan.

<sup>46</sup> Sanggar Sangkakala merupakan lembaga yang menangani seni teater atau seni peran. Kegiatannya meliputi: olah vocal, olah tubuh, olah rasa, mengarang naskah drama, tata rias, tata lampu, tata panggung dan dekorasi, musik, dll.

<sup>47</sup> Majalah Tilawah memuat berita hasil investigasi dan reportasi kru majalah Tilawah tentang isu-isu lokal maup nasional. Juga memuat artikel-artikel keilmuan, pendidika sosial, budaya, mimbar agama, sastra, dan lain sebagainya. Majalah ini juga menambah beritanya dengan suplemen bulletin STAR di setiap terbitannya. STARR adalah media yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar yang berminat menggeluti dunia jurnalistik. Berita-berita yang dimuat dalam STAR juga mengenai kehidupan para remaja dengan bahasa para remaja.

<sup>48</sup> Melalui LP2M para santri aktivis desa bina, selain aktif dalam kegiatan pembinaan masyarakat di lokasi desa binaan juga mampu menerbitkan Bulletin Dakwah "Lentera". Bulletin yang terbit bulanan ini memuat berbagai informasi tentang kegiatan dan pendidikan dakwah yang dilakukan oleh santri PPNU di desa binaan, sehingga bulletin "Lentera" bisa menjadi alat komunikasi antara PP. Nurul Ummah, desa binaan, dan masyarakat umum.

<sup>49</sup> Majalah dinding Assibag merupakan salah satu media informasi dan kreasi. Madding ini terbit sebulan sekali dan lebih mengutamakan berita-berita aktual sekitar pondok, baik itu berupa kebijakan-kebijakan pengurus, menyalurkan keluh kesah santri, hubungan pesantren dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

komunitas kajian sastra Sahara<sup>50</sup>, Nurul Ummah Language Club (NLC)<sup>51</sup>, dan lain-lain.

Di pesantren Nurul Ummah, selain para santri diberi kebebasan untuk memilih kelompok-kelompok yang telah ada untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas, pesantren juga memberikan kebebasan pada santri untuk bergabung dan beraktivitas dalam komunitas di luar pesantren selama tidak melalaikan kewajibannya sebagai santri, yaitu mengaji dan shalat berjamaah, terutama jamaah shalat Maghrib, Isya' dan Subuh. Selain itu, santri juga wajib berada di pesantren pada jam-jam tertentu, seperti pada jam belajar diniyah. Jika ada kegiatan lain yang berbenturan dengan jam belajar kitab, maka jam belajar di pesantren harus diutamakan.

Aturan demikian memang sering menjadi kendala, terutama santri yang berstatus mahasiswa. Tidak sedikit santri pondok pesantren Nurul Ummah, yang ingin mengikuti kegiatan organisasi di luar pesantren, terkendala karena jadwal aktivitas di luar pesantren sering berbenturan dengan jam-jam belajar kitab di pesantren. Mohammad Wildan menuturkan bahwa kasus santri yang keluar dari pesantren tidak selamanya karena faktor hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran santri, tetapi juga karena santri dihadapkan pada dua pilihan: aktif di organisasi yang ada di luar pesantren dengan konsekuensi keluar atau sering mendapatkan hukuman; atau tetap aktif di pesantren dan meninggalkan kegiatan organisasi di luar pesantren, disebabkan seringnya benturan waktu kegiatan organisasi dengan kegiatan belajar kitab di pesantren.<sup>52</sup>

Namun demikian bukan berarti semua santri Nurul Ummah meninggalkan organisasi di luar pesantren. Ada juga beberapa yang tetap aktif dengan cara mensiasati waktu. Ia akan aktif terlibat dalam organisasi di luar pesantren hanya pada waktu-waktu yang tidak berbenturan dengan kegiatan belajar kitab. Tetapi pilihan tersebut biasanya akan menuai konsekuensi, yakni sulitnya santri untuk menduduki posisi penting di organisasi, akibat dari keterbatasan waktunya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Komunitas ini dalam aktivitasnya mampu menerbitkan bulletin Sahara, sebuah bulletin yang mengkhususkan diri untuk penerbitan-penerbitan sastra (cerpen, puisi, artikel, sastra, naskah drama, dan kritik sastra).

<sup>51</sup> NLC adalah lembaga yang menangani kajian bahasa Asing (Arab dan Inggris) yang secara khusus ditujukan pada para santri pelajar pada MTsNU, MANU, dan sekolah lain yang sederajat.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Wildan, mantan Santri PPNU, 26 Maret 2007.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Keempat, Kebebasan Berpartisipasi. Partisipasi warga pesantren merupakan salah satu prinsip dasar dan sekaligus kunci yang menunjukkan adanya suasana yang demokratis dalam kehidupan pesantren. Yang dimaksud dengan partisipasi di sini erat terkait dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga pesantren. Nilai partisipasi warga pesantren itu sendiri dapat dicermati dari berbagai macam kegiatan yang ada di lingkungan pesantren.

Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi juga bisa dimaknai sebagai sebuah penciptaan dan penegakkan aturan main. Pada titik inilah partisipasi warga pesantren dapat dicermati, terutama terkait dengan peran sertanya dalam melahirkan sebuah aturan main. Apakah dalam merumuskan aturan main itu sang pembuat aturan sudah melibatkan warga pesantren secara partisipatif ataukah belum. Karena pada kenyataannya sebuah aturan atau tata tertib di pesantren sangat berpotensi menjadi alat penindas golongan yang kuat terhadap golongan yang lemah.

Dalam kehidupan di pesantren, partisipasi juga bisa dimaknai sebagai keterlibatan warga pesantren untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan pengurus, terlibat aktif dalam forum-forum santri, dan mencoba untuk selalu membicarakan masalah-masalah yang muncul. Melalui diskusi komunitas atau warga pesantren misalnya, ruang--ruang untuk membicarakan berbagai persoalan dapat dilakukan. Bahkan warga pesantren dapat mengelola, dan mencari solusi atas persoalan yang berkembang. Peran aktif warga pesantren dalam forum-forum yang ada dapat digunakan sebagai ukuran sejauh mana seseorang peduli terhadap apa yang tengah berlangsung dan berkembang dalam interaksi sosial mereka. Kreativitas para santri untuk mengembangkan forum-forum santri di lingkungan pesantren, juga bisa menjadi media partisipasi para santri dalam mengontrol perjalanan pendidikan di pondok pesantren, sehingga perjalanan pendidikan dapat berlangsung secara efektif.

Kebebasan berpartisipasi ini sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Bentuk dan tahap partisipasi meliputi: (1) partisipasi melalui kontak dengan pihak lain; (2) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat) maupun dalam arti menolak; (3) partisipasi dalam perencanaan, termasuk dalam hal ini pengambilan keputusan; (4) partisipasi dalam pelaksanaan program; (5) partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil; dan (6)

partisipasi dalam menilai.<sup>54</sup>

Jenis partisipasi di pesantren yang cukup kelihatan adalah pemberian suara santri dalam pemilihan lurah pondok. Pada beberapa pesantren tradisional, "Lurah Pondok" merupakan posisi yang cukup strategis bagi santri untuk menjalin kedekatan dengan pengasuh pesantren. Dengan posisi ini santri bisa mendapatkan akses informasi lebih banyak dibanding dengan santri lain. Bahkan dengan menjadi "Lurah Pondok" santri biasanya memperoleh pengalaman di luar pesantren melalui kunjungan-kunjungan pengasuh pesantren ke berbagai lokasi pengajian atau pertemuan lain, karena dialah yang biasanya akan diajak sebagai pendamping. Dengan posisi demikian, biasanya jabatan Lurah Pondok diamanatkan kepada santri senior yang dianggap memiliki kemampuan.

Pada pesantren Nurul Ummah Kotagede, Lurah Pondok dipilih oleh santri, meski model pemilihannya berubah-ubah. Menurut ustadz Kadirun, pemilihan Lurah Pondok pada kepengurusan yang sedang berjalan menggunakan mekanisme dua tahap, yaitu tahap penjangkaran dan tahap pemilihan. Pada tahap penjangkaran, para santri memilih beberapa santri senior yang akan diajukan sebagai calon Lurah Pondok. Setelah itu para pengurus pondok pesantren memilih salah satu dari beberapa bakal calon yang telah dijaring sebagai Lurah Pondok. Mekanisme ini dipilih dengan pertimbangan, bahwa pengurus lebih banyak mengetahui kondisi pesantren dan profil para calon Lurah Pondok.

*"Keputusan akhir yang menentukan siapa yang akan menjadi lurah pondok adalah rapat pengurus. Pertimbangannya, para santri yang telah menjadi pengurus mengetahui lebih banyak tentang track record dari para calon, dibanding dengan para santri yang bukan pengurus"<sup>55</sup>*

Pada periode sebelumnya, lurah pondok dipilih langsung oleh para santri; bahkan pernah pula lurah pondok dipilih dengan mekanisme pemilihan oleh pengurus dan perwakilan santri. Perubahan aturan pemilihan dari periode satu ke periode lain, menurut ustadz Kadirun, dilakukan setelah melalui mekanisme rapat perubahan amandemen.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Lihat, Sutomo, "Institusi Lokal sebagai Wahana Demokratisasi Pembangunan" dalam Tim Simpul Demokrasi (peny.), *Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang* (Malang: Averroes Press, 2007), hlm. 101-102

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Kadirun, Lurah Pondok pada Pesantren Nurul Ummah Kotagede, Mei 2008.

<sup>56</sup> *Ibid.* Adapun untuk Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, sebagaimana diceritakan Binti Muassarah (Bagian Humas PPNU Putri), pemilihan Lurah

Partisipasi santri dalam demokrasi tidak hanya terbatas pada proses pemilihan lurah pondok, melainkan juga partisipasi dalam berbagai urusan publik yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Yang paling krusial adalah partisipasi santri dalam proses mempengaruhi proses pembuatan keputusan, kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan tersebut.<sup>57</sup>

Rapat adalah media yang cukup representatif untuk melihat tingkat partisipasi warga pesantren dalam mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan. Dalam rapat santri bisa mengajukan usul dan saran perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam rapat pengurus pesantren tidak jarang terjadi silang pendapat.

Ustadz Muhaimin menuturkan betapa serunya bantah-bantahan yang terjadi antar pengurus ketika terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi sesuatu.<sup>58</sup> Menurutnya, yang namanya perbedaan pendapat, bantah-bantahan, dan kritik terhadap kebijakan pengasuh bukan sesuatu yang asing di pesantren tersebut.

Bentuk partisipasi lain yang muncul dalam pesantren sampel penelitian adalah partisipasi dalam pengelolaan keuangan. Partisipasi demikian terutama terjadi pada pesantren Nurul Ummah. Menurut penuturan ustadz Sigit Purnama dan Muhaimin, pada pesantren Nurul Ummah, masalah keuangan dikelola oleh para santri pengurus. Keluarga pengasuh tidak pernah melakukan intervensi, baik terkait dengan keuangan yang berasal dari syahriah santri maupun dari bantuan pemerintah atau donator lain yang dimaksudkan untuk pengembangan pesantren. Namun demikian, sebagaimana dituturkan Sigit Purnama, pengurus juga tidak menghabiskan dana operasional pendidikan tanpa memperhatikan keluarga pengasuh. Artinya, dengan porsi tertentu, ada dana yang disisihkan untuk keluarga pengasuh pesantren.<sup>59</sup>

---

Pondok dilakukan dengan cara pengajuan tiga bakal calon Lurah Pondok kepada Pengasuh. Jika ketiganya mendapat restu, maka para santri kemudian memilih satu di antaranya sebagai Lurah Pondok. Tetapi jika dari ketiga bakal calon yang diajukan ada yang ditolak, maka harus kembali diajukan bakal calon pengganti supaya ada tiga bakal calon yang mendapat restu, baru dilakukan pemilihan.

<sup>57</sup> Lihat IRE, *Annual Report 2001-2002 Desentralisasi dan Demokrasi Lokal* (Yogyakarta: IRE, 2002), hlm. 11

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Muhaimin, Kepala Madrasah Diniyah Nurul Ummah, April 2006.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan ustadz Muhaimin dan Sigit Purnama, April 2007 dan Maret 2008.



Partisipasi lain dari para santri yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pesantren, juga muncul dalam bentuk tulisan yang dimuat media milik pesantren. Hal ini terutama muncul pada pesantren Nurul Ummah yang memiliki media komunikasi dalam bentuk majalah, Koran, maupun bulletin. Tidak sedikit tulisan yang dimuat dalam majalah Tilawah, bulletin Mascott, serta Koran Nurul Ummah yang berisi kritik terhadap pesantren.

#### **D. Faktor Pendukung Aktualisasi Nilai Kebebasan di Pesantren**

Munculnya nilai kebebasan dalam pendidikan pesantren tidak terlepas dari beberapa faktor. Di antaranya adalah:

#### **4. Kesadaran Pentingnya Humanisasi Pendidikan**

Humanisme merupakan faham yang memandang bahwa manusia harus dihormati sebagai manusia seutuhnya tanpa memandang komunitas suku, agama maupun jenis kelamin.<sup>60</sup> Dalam pandangan Islam, humanisme harus dipahami sebagai suatu konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas. Ini mengandung pengertian bahwa makna atau penjabaran arti "memanusiakan manusia" itu harus selalu terkait secara teologis.<sup>61</sup>

Menurut Paulo Freire, secara fitrah manusia adalah pelaku atau subyek, bukan penderita atau obyek. Sebagai subyek, manusia adalah pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindasnya. Dunia dan realitasnya bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Manusia harus menggeluti dunia dan realitas dengan sikap kritis dan kreatif. Untuk itu manusia perlu memahami keberadaan dirinya. Di sisi lain pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan mendekatkan manusia dengan realitas sekitarnya.

Salah satu wujud semakin sadarnya pesantren akan humanisasi adalah adanya upaya penggantian hukuman fisik dengan denda atau hukuman yang mendidik. Menurut pengakuan santriwati di PPNU, hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh santri biasanya berupa denda, yang bisa berbentuk membayar uang,

<sup>60</sup> Frans Magnis-Suseno, "Humanisme Religius vs Humanisme Sekuler?" dalam Hasan Hanafi dkk., *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal* (Semarang-Yogyakarta: IAIN Walsongo Semarang Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 211

<sup>61</sup> Abu Hatsin, "Kata Pengantar" dalam Hasan Hanafi dkk., *Islam dan Humanisme: Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal* (Semarang-Yogyakarta: IAIN Walsongo Semarang Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2007), hlm.ix

membelikan alat tulis atau kebersihan dan piket kebersihan, tergantung pada macam pelanggaran yang dilakukan. Jika santri tidak mengikuti kegiatan belajar selama tiga kali biasanya akan dikenakan denda membelikan spidol. Jika santri pergi meninggalkan pesantren tanpa ijin, juga akan dikenakan denda membayar uang sebesar Rp.3000,- (semalam).<sup>62</sup>

Mohammad Wildan, mantan santri Nurul Ummah, juga mengungkapkan bahwa hukuman fisik tidak ditemukan lagi di pesantren Nurul Ummah. Hukuman yang diterapkan lebih banyak mengandung nilai pendidikan. Ia mencontohkan dirinya yang pernah dihukum untuk mengikuti shalat jama'ah rawatib di masjid Al-Faruq PPNU selama 40 hari, akibat sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di MDNU.

Kesadaran akan pentingnya humanisasi pendidikan akan mendorong pada terciptanya suasana hubungan antar pengasuh, kiai, ustadz dan santri yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Misi pendidik pesantren adalah mencerdaskan santri, bukan membodohkan. Misi tersebut membutuhkan landasan, yaitu rasa cinta dengan tanpa melihat latar belakang santri. Proses pencerdasan juga harus berangkat dari filosofis pendidik, bahwa santri adalah individu memiliki beberapa kemampuan dan ketrampilan. Kesadaran tersebut dalam perkembangan berikutnya juga akan memunculkan pengakuan dan kepercayaan terhadap potensi atau kemampuan yang dimiliki santri. Pendidik di pesantren tidak memandang santri dengan sebelah mata, tidak sepenuh hati, atau memandang rendah kemampuan santri.<sup>63</sup>

## **5. Kesadaran akan Perubahan Sosial dan Sikap Akomodatif Pesantren**

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial terus berlangsung selama masih ada kehidupan. Perubahan sosial terjadi dalam masyarakat disebabkan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Musyrifah dan Nargis Tsurayatul Ummah, santriwati pesantren Nurul Ummah Kotagede, Mei 2007.

<sup>63</sup> Lihat, Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik: Humanisasi Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 194

oleh berbagai macam faktor, seperti globalisasi, modernisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, penafsiran terhadap ajaran agama, dan sebagainya. Perubahan sosial tidak jarang melahirkan kompromi-kompromi. Dalam dunia pendidikan pesantren, modifikasi yang muncul sebagai akibat dari kompromi tersebut dalam pengertian tertentu bisa diartikan sebagai pergeseran orientasi pesantren dari kecenderungan model pendidikan keagamaan atau kajian atas ilmu-ilmu keislaman secara ketat ke arah pengajaran ilmu-ilmu keislaman yang bersifat terbuka dan akomodatif terhadap perubahan.

Setidaknya dalam kurun waktu sekitar tiga dasa warsa terakhir, pesantren tidak lagi menjadi institusi pendidikan keagamaan yang berada di pinggir perubahan sosial. Ia telah mengalami metamorfosis dan dalam perjalanannya terus menerus mencari bentuk atau menyesuaikan model kependidikan dengan tuntutan zaman. Mereka yang berada dalam komunitas pesantren, dengan kesederhanaannya mencoba menerjemahkan perubahan sosial dalam perspektif keunikan dan kekhasan yang dimilikinya.

Sebagaimana diungkapkan Hasyim Muzadi, bahwa sulitnya membendung dinamika sosial, politik dan budaya menuntut para ulama untuk membuka koridor pikirannya secara cerdas untuk menyelamatkan umat dari kebingungan dan kebimbangan. Mereka mencoba menawarkan alternatif yang diorientasikan pada kepastian normatif atas problem yang dihadapi umat. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa selama ini anggapan "pintu ijtihad" telah tertutup atau terlarang tidaklah benar. Semangat untuk terus menerus mencari dalil-dalil dan mengujinya seiring dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah pernah padam dan terus diaktualkan. Komunitas ulama tidak mendiamkan umat kehilangan pijakan yuridis atas problem yang dihadapinya.<sup>64</sup>

Jika dicermati secara seksama, sebenarnya pesantren sejak dulu telah memiliki wadah khusus untuk mengembangkan intelektualitas para santri, seperti: bahsul masail, munadzarah, dan musyawarah kitab. Melalui forum tersebut santri dapat berlatih untuk berinteraksi dengan kitab kuning secara lebih baik untuk selanjutnya menjadikan kitab tersebut sebagai rujukan dalam mencermati berbagai problem sosial dan keagamaan.

---

<sup>64</sup> A. Hasyim Muzadi, "Fiqih Kontemporer" Pengantar dalam Ahmad Munjin Nasih, *Kaum Santri Menjawab Problem Sosial Fenomena Bahsul Masa'il Pesantren Lirboyo Kediri* (Malang: UM Press, 2005), hlm. v

Keberadaan forum semacam bahsul masail sebenarnya menunjukkan hadirnya dinamika intelektual dalam tubuh pesantren. Melalui forum tersebut berbagai permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dibahas secara kolektif. Meski diakui bahwa kadang forum bahsul masail di pesantren lebih suka menanggukhan persoalan kontemporer disebabkan cara berpikir santri yang masih linier, dengan lebih mengutamakan *bermadzab qauli dari pada bermadzab manhaji*.

Menurut Ahmad Fikri, setidaknya ada tiga elemen yang mendorong pesantren mau menerima perubahan. *Pertama*, tuntutan internal kelembagaan pesantren. Dengan posisinya yang ada di tengah masyarakat, sekalipun pesantren memiliki tradisi budaya yang berbeda dengan struktur sosial di luarnya, tetapi ia tetap tidak bisa menolak pengaruh yang berasal dari luar pesantren. Kondisi demikian sangat mudah dijumpai pada beberapa pesantren yang berada di perkotaan. Pesantren di perkotaan selain berupaya memperbaiki sistem pendidikan juga bersifat kompromistis terhadap kehidupan masyarakat setempat. *Kedua*, peran alumni pesantren yang telah mengenyam pendidikan luar pesantren mendorong pesantren melakukan upaya-upaya perbaikan dan pendefinisian peran mereka dalam keikutsertaannya memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. *Ketiga*, peran pengasuh pesantren (kiai) ikut menentukan corak dan karakteristik peran pesantren dalam perubahan sosial. Kiai dengan otoritas kharismatiknyanya justru sering menampakkan peran yang lebih tinggi dibanding dengan dua elemen sebelumnya. Kebijakan pesantren, baik yang bersifat internal maupun eksternal, tidak bisa berlaku secara efektif apabila belum mendapatkan persetujuan dari kiai.<sup>65</sup>

Sebagai pemegang otoritas di pesantren, fungsi dan peran kiai memang sangat dominan, sehingga bentuk dan pola-pola perubahan di pesantren seringkali mengikuti kehendak dan aktivitas kiaiinya. Kalau kiai ikut berpolitik sangat besar kemungkinan pesantren yang menjadi basis peran sosialnya dilibatkan sedemikian rupa. Dengan demikian intensitas, kapabilitas dan mobilisasi kiai merupakan sesuatu yang berperan besar dalam menentukan masa depan dan peran sosial pesantren dalam masyarakat.<sup>66</sup>

Namun demikian, sebagaimana dikatakan Muchtar Bukhori, untuk dapat melakukan fungsi-fungsi keulamaan seperti:

---

<sup>65</sup> Akhmad Fikri AF, "Narasi Ringan Tentang Pesantren" dalam Majalah *Tilawah* edisi I/Tahun V/1996, hlm. 48-49

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 49

membimbing ummat untuk mengembangkan sikap yang sehat dan dewasa dalam menghadapi kenyataan terkait dengan ketertinggalan dalam berbagai hal; membimbing umat untuk mengembangkan tekad yang kuat untuk mengejar segenap ketinggalan yang terdapat dalam masyarakatnya; dan membimbing umat untuk mengejar ketertinggalan, kiai dituntut untuk membekali diri dengan tiga jenis pengetahuan dan kemampuan. *Pertama*, pengetahuan tentang agama Islam yang tersusun secara sistematis, baik pengetahuan mengenai Islam sebagai agama, sebagai ajaran keimanan, maupun mengenai Islam sebagai suatu kebudayaan (*civilization*), sebagai suatu cara hidup yang dikembangkan oleh berbagai jenis umat Islam di berbagai kawasan dunia, sepanjang zaman. *Kedua*, Pengetahuan tentang persoalan zaman yang ada dewasa ini, khususnya pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan umat Islam Indonesia dewasa ini. *Ketiga*, Kemampuan untuk meramu suatu bagian dari pengetahuannya tentang agama Islam dengan pengetahuan tentang persoalan zaman dalam menyusun program bimbingan bagi umatnya, sehingga terwujud rangkaian kegiatan bimbingan yang dirasakan, mantap dan mengenai persoalan, oleh umat yang dibimbing.

Sikap akomodatif kiai Asyhari Marzuqi terhadap pola manajemen modern dalam pengelolaan pesantren juga menjadi faktor yang mendukung tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi di pesantren. Menurut penuturan Sigit Purnama, ketika ada pengurus pesantren yang mengajukan usul kepada KH. Asyhari Marzuqi, usul tersebut tidak serta merta ditolak atau diterima. Beliau justru kembali menanyakan kepada yang usul, apakah ia mampu melaksanakan. Jika mampu, maka sang kiai akan memberikan ijin untuk dilaksanakan.<sup>67</sup>

Dengan semakin terbukanya berbagai macam informasi dan sumber-sumber pengetahuan, pesantren akan mengalami kesulitan jika berkeinginan untuk membendung arus liberalisasi wacana, kebebasan berfikir, dan arus kebebasan mengakses sumber-sumber pengetahuan. Maka bukannya tidak mungkin wacana kontemporer semacam demokrasi, liberalisasi, atau bahkan Post- Tradisionalisme Islam semakin marak dan semakin mendapat tempat di kalangan para santri yang sekaligus juga terdidik dalam lembaga pendidikan formal, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Sikap akomodatif ustadz dan pengasuh pesantren, memang tercermin dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Sigit Purnama, Maret 2008.

pesantren Nurul Ummah. Pada pesantren tersebut model pembelajaran sebagaimana yang lazim diterapkan diperguruan tinggi juga bukan sesuatu yang asing. Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa santri merujuk pada simpulan yang sama, bahwa pembelajaran di pesantren Nurul Ummah banyak mengadopsi pola pembelajaran di perguruan tinggi. Kondisi demikian disebabkan banyaknya para santri senior yang nota bene adalah mahasiswa IAIN (UIN) Sunan Kalijaga, baik yang mengambil program sarjana (S-1) maupun program Pasca Sarjana (S-2). Selain itu, latar belakang pendidikan KH. Asyhari Marzuqi yang merupakan santri-akademisi juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebab dengan pengalaman pendidikan formal yang diperoleh, setidaknya tertanam sikap positif dalam menanggapi atau menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, atau bahkan dalam bidang pendidikan.

### 3. Persentuhan Pesantren dengan Perguruan Tinggi.

Persentuhan pesantren dengan lembaga pendidikan tinggi Islam nampaknya juga tidak bisa diabaikan. Fuad Jabali dan Jamhari menunjukkan tiga alasan sebagai bukti peran dan sumbangsih IAIN dalam transformasi dan modernisasi pondok pesantren. Pertama, IAIN merupakan salah satu jalur terbesar bagi mobilitas pendidikan kaum santri. Kedua, IAIN memberikan perspektif modern dan liberal dalam kajian-kajian keislaman. Ketiga, banyak alumni IAIN yang menjadi guru atau kiai di pesantren.<sup>68</sup>

Jika ditelusur dari latar belakang pendidikan kiai dan ustadz yang ada pada tiga pesantren yang diteliti, yaitu pesantren Nurul Ummah akan tampak bahwa mayoritas berlatarbelakang pendidikan IAIN (UIN). Sementara model studi Islam yang dikembangkan di IAIN (UIN) adalah "Islam Liberal". Di IAIN (UIN) tidak mengajarkan fanatisme madzab, melainkan mengkaji semua madzab. Model semacam ini ternyata telah berhasil mentransformasikan cara berpikir dan sikap hidup kalangan mahasiswa yang berasal dari pesantren atau bahkan sedang nyantri. Mereka sering diajak berpikir untuk memformulasikan Islam di dalam konteks kehidupan riil masyarakat kontemporer. Pada gilirannya, ketika mereka kembali atau berada di pesantren akan membawa perspektif Islam dari IAIN (UIN) ke lingkungannya. Maka dapat dipastikan salah satu faktor penting pendorong terjadinya transformasi nilai kebebasan dalam proses pendidikan di pesantren Nurul Ummah adalah adanya

---

<sup>68</sup> Fuad Jabali dan Jamhari (peny.), *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 108

pengaruh alumni dan mahasiswa IAIN (UIN) yang berkiprah di pesantren baik sebagai kiai maupun ustadz (guru).<sup>69</sup>

#### 4. Banyaknya Media yang Muncul di Pesantren

Media memiliki fungsi yang strategis bagi tumbuhkembangnya nilai-nilai demokrasi. Media juga bisa berfungsi sebagai kontrol sosial dan pembentuk opini publik. Sebagai alat kontrol sosial, media bisa melakukan pengawasan dan kritik terhadap berbagai pelanggaran atau penyimpangan kebijakan yang mungkin terjadi. Oleh karenanya melalui media, selain dapat diperoleh berbagai informasi, seseorang juga dapat memberikan atau menyalurkan aspirasinya sebagai wujud dari partisipasinya terhadap berbagai kebijakan yang dimunculkan.

Sebagai alat untuk membentuk opini, melalui pemberitaan yang disajikan media mampu mengarahkan pandangan seseorang terhadap suatu obyek atau peristiwa. Konsep pemberitaan media massa terkadang juga relevan dengan opini publik. Dalam banyak kasus, media juga bukan hanya sekedar menjadi pembentuk pendapat umum, namun keberadaan media itu sendiri merupakan ruang publik (*public sphere*) atau area publik (*public area*) di mana permasalahan kebijakan dirumuskan dan diperkuat.

Menurut Habermas, sebagaimana dikutip Moh. Muzakki, ruang publik merupakan ruang yang berada di antara negara dan kapital, di mana publik dapat secara bebas mengekspresikan opini dan menjalankan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintahan. Ada tiga prinsip utama dalam ruang publik, yaitu: (1) adanya akses yang mudah terhadap informasi; (2) tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang istimewa terhadap peserta diskusi; dan (3) peserta mengemukakan alasan rasional dalam berdiskusi untuk mencari konsensus.<sup>70</sup>

Munculnya berbagai macam media di pesantren, terutama media yang muncul sebagai kreativitas dari para santri menjadi faktor pendorong bagi tumbuhkembangnya nilai-nilai demokrasi. Semakin banyak media yang dimiliki pesantren, semakin banyak kesempatan bagi para santri untuk melakukan aktualisasi diri. Namun demikian juga perlu diingat bahwa pula sebagian ahli yang berpandangan bahwa semakin banyaknya media tidak serta merta mengundang kepuasan publik, terutama jika peningkatan jumlah

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>70</sup> Moh. Muzakki, "Kapitalisasi Media dan Demokrasi" dalam Tim Simpul Demokrasi, *Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan Demokrasi di Kabupaten Malang* (Malang: Averroes, 2007), hlm. 232

media tidak paralel dengan peningkatan kualitas informasi yang disajikan kepada publik. Sebab bukan rahasia lagi bahwa kekuatan media sangat ditentukan pula oleh pemilik modal yang berada di belakangnya.

## E. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai kebebasan yang hidup dan operasional dalam pendidikan di pesantren Nurul Ummah meliputi nilai kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi. Nilai kebebasan tersebut hidup dan operasional dalam pendidikan di pesantren, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam proses interaksi yang terjalin antara kiai-santri, ustadz-santri, maupun antara santri dengan sesamanya.
2. Nilai-nilai tersebut hidup dan operasional dalam pendidikan di pesantren selain karena faktor ajaran Islam yang terkandung dalam kitab-kitab kuning dan referensi lain yang dipelajari di pesantren, juga karena cara pemahaman kiai dan ustadz terhadap teks yang tidak tekstualis, serta sikap akomodatif pengasuh pesantren maupun para ustadz pembantu terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Adapun faktor-faktor yang mendukung perkembangan nilai kebebasan pada pesantren Nurul Ummah adalah: (a) adanya kesadaran akan pentingnya humanisasi pendidikan; (b) kesadaran akan perubahan sosial dan sikap akomodatif sivitas pesantren terhadap pemikiran yang inovatif; (c) persentuhan pesantren dengan perguruan tinggi; dan (d) banyaknya media dan kegiatan yang muncul di pesantren.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terj. Drs. Wahid Wahab, MA, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Asmawi, Jamal Ma'mur, "Dialektika Pesantren dengan Tuntutan Zaman", dalam, M. Affan Hasyim, et. al., *Menggagas pesantren Masa Depan: Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru*, Yogyakarta: Qirtas, 2003



- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999
- Chamim, Asyhuri Ibn, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan, Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, The Asia Foundation, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003
- Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, tel. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
- Depag RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Dirjen Bagais Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Proyek Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah pada Pondok Pesantren, 2003,
- Efendy, Bachtiar, "Islam, Demokrasi dan Modal Sosial" dalam Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi: Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia*, Jakarta: Gugus Press, 2002
- Enha, Ilung S., *Sangkar Besi Agama: Tafsir Sang Kyai Versi Malinkundang* Yogyakarta: Alenia, 2003
- Faisal, Amir, "Tradisi Keilmuan Pesantren: Studi Banding Antara Nurul Iman dan as-Salam", *Disertasi*, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Fariz, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur, MA., Jakarta: Robbani Press, 2000
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Hadimulyo, "Dua Pesantren Dua Wajah Budaya", dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985,
- Haedar, HM. Amin dan Abdullah Hanif (Ed.), *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2004
- Hasan, Muhammad Tholchah, "Masalah dan Prospek Kitab Kuning di Indonesia" dalam *Majalah Aula*, Februari 1986,

- Hasbi, H. Artani, *Musyawaharah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintas Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Held, David, *Demokrasi dan Tatahan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, terj. Damanhuri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, terj. Muhammad Abdul Ghofaar E.M., Bandung: Mizan, 2003
- Jabiri, Muhammad Abed Al, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Katsoff, Louis, *Pengantar Filsafat*, terjemah Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996
- Koran Nurul Ummah (Nurma), Edisi 18 Th 1, 27 Januari 2008
- Koran Nurul Ummah Edisi 37 Th 1, 15 Februari 2008, "Lampu Hidup-Mati, Mujahadah Ngorok"
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Madjid, Nurcholish, "Transisi ke Demokrasi" dalam *Fatsoen Tekad* No. 16/th.1, 15-21 Februari 1999 dan "Demokrasi Dinamis", Dalam *Fatsoen Tekad*, No. 2/th. 1, 9-16 Nopember 1999
- Makruf, Jamhari, "Pengalaman Pondok Pabelan: Demokrasi Kecil di Tengah-tengah Lingkungan Pesantren", *makalah* seminar Pendidikan Demokrasi di Pesantren 20-22 April 2005 di Cipayung Bogor
- Mastuhu, 1994, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terjemah Cecep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992),
- Mudzhar, M. Atho, "Pendidikan Demokrasi di Pondok Pesantren" *Makalah*, Seminar Pendidikan Demokrasi di Pesantren 20-22 April 2005 di Cipayung Bogor
- Muhtarom HM., "Pondok pesantren Tradisional di Era Globalisasi: Kasus Reproduksi Ulama di Kabupaten Pati Jawa Tengah", *Disertasi*, Yogyakarta: Pasca Sarjana, 2004
- Mun'im, Abdul, "Bahtsul Masa'il: Tradisi Akademis Muslim Tradisional" dalam *Jurnal Gerbang*, No.12, Vol.V, Juli-September 2002

- Rahardjo, M. Dawam, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan", dalam M Dawam Rahardjo (Ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1974
- Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rofiq Nurhadi, 2003, "Demokratisasi Sistem Pendidikan Pesantren: Studi Kasus di PP Al-Husein Dusun Krakitan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang", *Tesis*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Suka
- Rosyada, Dede, , *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2004
- Rosyada, Dede, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation dan PrenadaMedia, 2003
- Sadek Jawad Sulaiman, 2001, "Demokrasi dan Syura", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Paramadina
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Uinat*, Bandung: Mizan, 1996
- Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2002
- Suaedy, Ahmad, (Ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- Sukron Kamil, 2002, *Islam & Demokrasi: Telaah Konseptual & Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Suparta, Mundzier dan Amin Haedari (Ed.), *Manajemen Pondok Pesantren* Jakarta: Diva Pustaka, 2004,
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1995
- Syahrur, Muhammad, *Diraskt Islamiyyah Mu'ashirah fi Al-Dawlah wa Al-Mujtama'*, Dimasyq: Al-Ahali li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', 1994

- Tamimi, Azzam S., "Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam", dalam Bernard Lewis, et. al., *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2002
- Taufik Abdullah, 1991, "Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah: Sebuah Sketsa", dalam *Prisma Edisi III Tahun 1991*
- Taufiq Muhammad Asy-Syawid, 1997, *Syura Bukan Demokrasi*, terjemah. Jamaludin ZS, Jakarta: Gema Insani Press
- Thohir, Ajud, *Gerakan Politik Kaum Tarekat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan The Asia Foundation dan Prenada Media
- Tim Revisi, 2005, *Panduan Pondok Pesantren Nurul Ummah*, Yogyakarta: Sekretariat PPNU
- Turabi, Hasan Al, *Fiqih Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zainul Am, Bandung: Mizan, 2003
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, terj. Suprianto Abdi, Yogyakarta: LKiS, 2004
- Ubaidillah, Ahmad, (et.al), *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- Uhlen, Anders, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, terj. Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998
- Ulil Abshar Abdalla, 1999, "Humanisasi Kitab Kuning: Refleksi dan Kritik atas Tradisi Intelektual Pesantren" dalam *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Wahid, Abdurrahman, "Pesantren sebagai Subkultur", dalam M. Da-wam Rahardjo, (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan* Jakarta, LP3ES, 1983
- Wahid, Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Kepemimpinan dalam Pengembangan Pesantren*, naskah ceramah disampaikan pada Latihan Tenaga Pembina Pondok Pesantren yang diselenggarakan Departemen Agama RI, di Cibubur - Jakarta, 2-12 Oktober 1978.
- Zamakhsyari Dhofier, 1994, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES

Zamroni, 2001, *Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, Jakarta: P3M, 1983.